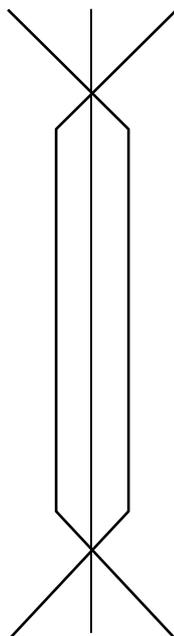




**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

---

**RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
(RENJA DINAS PMDPPKB)  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sultan Alam Bagarsyah Telp. ( 0752 ) 71126 Batusangkar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/ /PMDPPKB/2018  
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
( RENJA DINAS PMDPPKB )  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019  
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

LEMBARAN.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/ /PMDPPKB/2018  
TANGGAL : 2018

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- KEDUA : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 memuat kondisi *exsiting* sebagai evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar 2017, target kinerja Tahun 2019 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarnya, Rencana program dan Kegiatan tahun 2019 dengan *output* dan *outcome* yang jelas serta sumber pembiayaannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



**ADRION NURDAL SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620214 199003 1 003

***Tembusan :***

- Yth.
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
  2. Ketua DPRD kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
  3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.

Renja ini memuat Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni : (1) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya; (2) Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat; (3) Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan; (4) Pengurangan pengangguran dan kemiskinan; dan (5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejalan prioritas pembangunan daerah tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan, yakni : (1) Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud,

secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan tahun 2019 serta prakiraan maju tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Batusangkar, 2018.  
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



**Drs.FAISAL.A**  
Pembina Tk.I,  
NIP. 19610704 198503 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	14
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...	21
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	24
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	32
BAB V : PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	
1. TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 KABUPATEN TANAH DATAR	
2. TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (SIMREDA)	
3. TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2018	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perakiraan maju. Kebijakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 dituangkan dalam Renja Tahun 2019. Renja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan dengan substansinya menjabarkan visi misi dan arah pengelolaan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 1 tahun kedepan .

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan dokumen Rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam jangka waktu satu tahun.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja OPD
- b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
- c. Pelaksanaan Forum SKPD
- d. Penetapan Renja OPD

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun mengacu pada rancangan awal RKPD dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkewajiban menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan.

Renstra RKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selaras

dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memperhatikan juga Renja K/L terkait. Renja OPD Provinsi terkait khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang ditangani dan atau dibiayai Provinsi dan atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan atau APBD Provinsi. Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437 ) Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005-2025;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016-2021;
  - k. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah ;

1. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD**

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun lalu terkait pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan SKPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas	90%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
2.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD yang baik	4 dok	4 dok	2 dok	4 dok	2 dok	100%	100%
3.	Dokumen Perencanaan SKPD yang didukung data informasi yang akurat	6 dok	6 dok	4dok	6 dok	4 dok	100%	100%
	Rata-rata							

Dari indikator keberhasilan dalam meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tahun 2017 didukung oleh program berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
- Program Pengembangan Data/Informasi

Dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- Faktor Keberhasilan
  - Adanya komitmen dari PNS
  - Perencanaan kerja yang terprogram
  - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup
  - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
  - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Faktor Kegagalan
  - Tidak ada faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan bahkan materi lomba bertambah dari materi yang diprogramkan.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	70 %	70 %	75 %	70 %	75 klp	100	100
2.	Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan Masyarakat	80 %	80 %	85 %	80 %	85 %	100	100
3.	Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif	77 %	77 %	80 %	77 %	80 %	100	100

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*
- *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

- Faktor Hambatan

- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program ini.

**Sasaran 3 : Meningkatkan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	75 klp	75 klp	75 klp	75 klp	75 klp	100	100
2.	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna ( TTG )	6 klp	6 klp	8 klp	6 klp	8 klp	100	100

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga

pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- *Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
  - Perencanaan kerja yang terprogram;
  - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
  - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
  - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
  - Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.
- Faktor Hambatan
- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program in

**Sasaran 4 : Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam ber KB**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,9	2,9	2,7	2,9	2,58	100	97
2.	Ratio Akseptor KB	68,86 %	68,86%	73,87 %	68,86	73,87	100	100
3	Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)	12,5	12,5	11,5	12,5	11,5	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolak ukur sasaran yang ingin di capai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB seperti penyediaan Balai Penyuluh KB, penyediaan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi, penyuluhan KB telah terealisasi pada Tahun 2017 di dalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
- *Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR*
- *Keluarga Berencana*
- *Pelayanan Kontrasepsi*

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

-Faktor Keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- Terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama pelaksanaan program berlangsung tidak ditemui faktor kegagalan dan permasalahan serta hambatan dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran 5 : Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah PIK-R yang aktif	6 Klp	6 Klp	8 Klp	6 klp	8 klp	100	100
2.	Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	2.000 org	2.000 org	2.400 org	2.000 org	2.400 org	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran 6 : Meningkatkan pemberdayaan ketahanan keluarga**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	42 Klp	42 Klp	56 Klp	42 klp	56 klp	100	100
2.	Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif	4 klp	4 klp	5 klp	4 klp	5 klp	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta

langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran 7 : Terciptanya Tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah Tata kelola pemerintahan Nagari yang baik	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	100	100
2.	Jumlah Tata kelola pemerintahan nagari yang bersih	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kepada nagari di Kabupaten Tanah Datar dan telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*
- *Program Pendidikan Politik Masyarakat*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta

langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar**

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana tergambar pada Lampiran I Renja.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Pe4nduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.**

1. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
3. Rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa/nagari dalam pelaksanaan pemerintahan.
4. Masih rendahnya keikutsertaan keluarga dalam upaya melembagakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni sebagai pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Untuk lebih detailnya lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari 2 aspek :

1. Kondisi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup organisasi dan pola pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dilaksanakan masing-masing Bidang.
2. Kondisi dan situasi eksternal dari masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing Bidang.

Secara Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah gabungan dari beberapa instansi sebelumnya yakni Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDPPKB) yang kemudian menjadi beberapa Bidang. Masing-masing Bidang tersebut secara kontekstual adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Kurangnya personil untuk menempati posisi dan tugas di setiap Nagari, yakni baru 41 orang petugas fungsional yang mempunyai wilayah kerja, jadi tidak proporsional untuk melayani masyarakat sesuai kondisi situasi, serta aksesibilitas Nagari yang beragam dan 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum bersinerji kinerja antara perencana dan pimpinan kegiatan, Koordinator kegiatan, serta penanggungjawab kegiatan dengan tenaga UPTD dan fungsional dilapangan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 berjumlah sebanyak 9 program dan satu diantaranya adalah program dibidang Kesehatan. Untuk mendukung program nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan prioritas pembangunan yaitu Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang didalamnya ikut bertanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan sasaran strategisnya adalah Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana.
2. Program Pelayanan Kontrasepsi.
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar**

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## **I. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, secara kolektif menggambarkan arah strategis OPD dengan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri
2. Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik, bersih dan akuntabel.
3. Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.

## **II. Sasaran**

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memberikan fokus pada penyusunan program/kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tujuan 1 : Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1.Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2.Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan masyarakat
	3.Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif
2.Meningkatnya pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan	1.Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
	2.Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)

**Tujuan 2 : Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik dan bersih**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1. Tercitanya tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik dan bersih	1. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik
	2. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih

**Tujuan 3 : Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2. Rasio Akseptor KB 3. Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmeed nedd)

2.Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	1. Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif
	2. Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
3.Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga	1.Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif
	2.Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka ditetapkanlah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
- k. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan keuangan.

Dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan perencanaan tahunan
5. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah :
  - a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
6. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pembinaan Keluarga Berencana
  - b. Penyelenggaraan bantuan operasional KB
  - c. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
  - d. Desiminasi kebijakan pengendalian penduduk
7. Program Pelayanan Kontrasepsi; dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pelayanan pemasangan Kontrasepsi
8. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan:
  - a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan antara lain
  - a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
10. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
  - b. Pemberian stimulasi pembangunan desa
  - c. Pembinaan Nagari berprestasi
  - d. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - e. Sosialisasi dan pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat
  - f. Pembinaan LPM
  - g. Peningkatan dan Fasilitasi operasional profil dan data nagari
  - h. Koordinasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Proses Pembelajaran Masyarakat ( KKN-PM )

13. Program Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembinaan dan Gelar Teknologi tepat Guna ( TTG )
  - b. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat pedesaan
14. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi dan temu kader Posyandu
  - b. Sosialisasi, pembinaan dan orientasi PMT-AS
  - c. Pembinaan dan Fasilitasi kelembagaan masyarakat
  - d. Fasilitasi pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat
15. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
  - b. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
  - c. Penilaian Kompetensi Wali Nagari
  - d. Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
  - e. Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
  - f. Penilaian BPRN
16. Program Kerjasama pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha
  - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Aset nagari
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
  - b. Sosialisasi Produk Hukum
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 yang terdiri dari 4 urusan, 19 Program dan 55 Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp.5.684.666.000.- dan belum termasuk dana Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun 2019 sebagaimana Tabel Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah daerah dalam pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini memberi arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk masa 1 (satu) tahun ke depan yang terencana dan terkoordinasi secara harmonis.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar beserta

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Tentunya kedepan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan dapat memberi warna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan terlaksananya percepatan pembangunan daerah pada tahun terakhir dan pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. ( 0752 ) 71126 Batusangkar

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

( RENJA DINAS PMD )

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019

KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

LEMBARAN.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018

TANGGAL : 26 Maret 2018

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;

LEMBARAN.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENBDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018  
TANGGAL : 26 Maret 2018

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 00 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor Seri );
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemerdyaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, sebagaimana terlampir pada keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakt, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum pertama terditi dari :

1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Renja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Penge Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar.
  - b. Menetapkan Usulan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Pengorganisasian penyusunan Renja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar.
  - b. Mengkoordinasikan proses penyusunan renja dengan Bidang-bidang dan OPD terkait.
  - c. Mengusulkan draf usulan Renja Tahun 2019 kepada Penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Usulan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

LEMBARAN .....

---

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENBDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018  
TANGGAL : 26 Maret 2018

3. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Pengorganisasian penyusunan Renja dilingkungan bidangnya masing-masing.
  - b. Mengusulkan draf usulan Renja Tahun 2019 bidangnya masing-masing kepada Penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Usulan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
  - c. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
    - a. Menyusun jadwal penyusunan Usulan Renja 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Kerluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
    - b. Menyiapkan format-format usulan Renja Tahun 2019.
    - c. Meneliti dan membuat usulan renja dari sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
  - d. Anggota, bertugas sebagai berikut :
    - a. Mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan renja.
    - b. Menyusun dan menyampaikan rancangan Renja 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar Tahun 2019

KEEMPAT. ....

LEMBARAN KELIMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENBDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018  
TANGGAL : 26 Maret 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



**ADRION NURDAL, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620214 199303 1 003

**Tembusan :**

- Yth.
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
  2. Ketua DPRD kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
  3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 414.2 /15/PMDPPKB/2018  
TANGGAL : 26 Maret 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1.	ADRION NURDAL.SE 19620214 199003 1 009	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Drs. FAIZAL. A 19610904 198504 1 009	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris	Ketua
3.	Dra.MASFI YENDRA 19611103 198503 2 006	Pembina Tk,I, IV/b	Kabid Pemerintahan Desa	Wakil Ketua I
4.	Dra.SRI HASTURI, Msi 19660916 198602 2 002	Pembina, IV/a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua II
5.	IRDAYANI, SPi 10671206 199403 2 007	Pembina, IV/a	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua III
6.	YENDRIFIZAL 19660618 198603 1 005	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
7.	RERI WARMAN SKM 19680228 199102 1 002	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	RENI ZASRIYENNI. SE 19680613 199303 2 007	Penata Tk. I, / III/d	Kasubag Keuangan	Anggota
9.	INDRA DARMANTO.SKM.MKM 19750321 199403 1 004	Penata, III/c	Kasi KB	Anggota
10.	DERIT INDAH. S.Sos 19761103 199703 2 001	Penata, III/c	Staf	Anggota
11.	RINI ELMIATI. SE 19831012 201001 2 003	Penata Muda, III/a	Staf	Anggota
12.	DENY YUDE 19830121 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Staf	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

  
**ADRION NURDAL, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620214 199303 1 003

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja [Dinas PMDPPKB] dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018  
Kabupaten Tanah Datar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan									
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang terlayani adm perkantoran								
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyura	Materai Rp.3000,- dan Materai Rp.6000,-	100	100	100	100	100	750 bh	100	100
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kwh listrik, Jumlah Volume air yang digunakan dan jumlah tagihan telepon	100	100	100	100	100	16,99 kwh 5,44 m3 1 th	100	100
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 ( 7 unit) dan roda 2 ( 60 unit ) yang dibayar pajaknya	100	65 unit	100	100	100	7 unit roda 4 60 unit roda 2	100	100

2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	100	13 unit	100	100	100	100	24 jenis	100	100
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	100	100	100	100	100	100	40 jenis	100	100
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang dicetak, jumlah barang yang difoto copy dan jumlah barang yang dijilid	100	100	100	100	100	100	16 jenis 16.680 lbr 50 bh	100	100
2.07.1.02.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik	100	100	100	100	100	100	15 jenis	100	100
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan (surat kabar)	100	100	5 koran	5 koran	100	100	8 bh koran	100	100
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang disediakan	100	100	100	100	100	100	1.700 porsi	100	100
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dalam daerah dan luar daerah	100	100	100	100	100	100	118 kali 7 kali	100	100

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	Jumlah tenaga kerja dengan penghasilan kerja	100	3 org	3 org	3 org	100	7 org	7 org	100
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit	Jumlah Tim penilai angka kredit	100	34 org	34 org	34 org	100	14 org	101 org	100
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan</b>								
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor		3 unit	1 unit	1 unit	100	0	4 unit	100
2.07.2.07.01 2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Dinas PMDPPKB		9 unit	14 unit	14 unit	100	44 unit	67 unit	
2.07.2.07.01. 2.10	Pengadaan meubiler	Jumlah pengadaan meubiler		1 unit	0	0	0	0	1 unit	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan Gedung Kantor yang diperbaiki	100	3 unit	2 unit	2 unit	100	3 unit	8 unit	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diperbaiki	100	65 unit	100	100	100	22 unit	100	100

2.07 . 2.07.01 .02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100	100	100	100	100	65 unit	100	100
2.07 . 2.07.01 .02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	100	100	100	100	84 unit	100	100
2.07 . 2.07.01 .02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pagar gedung penyuluh KB yang dibangun			0	0	0	2 unit		
2.07 . 2.07.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Persentase Pegawai yang mengikuti diklat</b>								
2.07 . 2.07.01 .05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	100	100	100	100	100	4 org	100	100
2.07 . 2.07.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<b>Persentase laporan yang disusun tepat waktu</b>								
2.07 . 2.07.01 .06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	3 dok	3 dok	4 dok	4 dok	100	3 dok	10 dok	
2.07 . 2.07.01 .06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan	2 dok	0	0	0	0	2 dok	2 dok	





2.07 . 2.07.01 .15 . 08	Fasilitasi Pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat	<p>1. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar nagari dalam pengelolaan pembangunan</p> <p>2. Terlaksananya keterlibatan kelompok masyarakat miskin perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari.</p> <p>3. tersedianya sarana dan prasarana sosial dasara dan ekonomi masyarakat.</p> <p>4. terlaksananya bimbingan teknis workshop, sosialisasi rakor, rakornis, dan monev pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.</p> <p>5. terlaksananya fasilitasi penyedia sarana prasarana dan pelayanan dasar serta pengelolaan pelaksanaan pembangunan nagari.</p>	75 Nag							
----------------------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

4.03 . . 2.07.01 . 16 .	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama nagari dengan dunia usaha/lembaga								
4.03 . 2.07.01 . 16. 03	Fasilitasi kerjasama dengan duania usaha/lembaga	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi ttg kerjasama desa dengan dunia usaha			0	0	0	1 Peraturan	1 Peraturan	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev			75 nagari	75 nagari	100	75 nagari	75 nagari	
2.08 . 2.07.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase perkawinan dibawah umur ideal								
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Sosialisasi prog.kesehatan reproduksi remaja, pemilihan duta genre, jambore Tk.Prov. dan nasional	300 klp	32 klp	52 klp	52 klp	100	44 klp	128 klp	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan								
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terlaksananya pembinaan LPKN		0	0	0	0	14 Kec	14 Kec	

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna	Terlaksananya TTG tk.Prov dan Nasional, terbentuknya posyantek baru dan pembinaan posyantek	14 posyantek	2 keg	2 keg	2 keg	100	2 keg	6 keg	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10	Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah	Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi masyarakat simpan pinjam	75 Nag	14 Kec	75 Nag	75 Nag	100	75 nagari	75 nagari	
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi								
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan Kontrasepsi kepada peserta KB			910 akseptor	910 akseptor	100	1000 akseptor		
4.04 . 2.07.01 . 17	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Pengelolaan aset nagari								
4.04 . 2.07.01 . 17.05.	Pengelolaan aset nagari	Terlaksananya pengelolaan aset nagari			0	0	0	75 nagari	75 nagari	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari								
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terfasilitasinya pelaksanaan musrenbang nagari	75 Nag	75 Nag	75 Nag	75 Nag	100	75 Nag	75 Nag	



2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah nagari								
2.07 . 2.07.01 . 18.01	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Terlaksananya sosialisasi Bimtek pembangunan kawasan pedesaan	75 nagari		0	0	0	75 nagari	75 nagari	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah nagari	75 Nag	0	75 nagari	75 nagari	100	75 Nagari	75 Nagari	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06	Penilaian Kompetensi Wali Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi wali nagari Tk.Kab. dan Provinsi	75 Nag	0	0	0	0	75 Nagari	75 Nagari	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya penilaian KAN Tk.Kab dan Prov,	75 Nag	0	75 nagari	75 nagari	100	75 Nagari	75 Nagari	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09	Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari	Terlaksananya penilaian Sekretaris Tk.Kab dan Prov	75 Nag	0	0	0	0	75 Nagari	75 Nagari	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 10	Penilaian BPRN	Terlaksananya penilaian BPRN tk.Kab.			0	0	0	75 nagari	75 nagari	
4.01.2.07.01. 20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan								
4.01.2.07.01. 20.06	Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terlaksananya kajian hukum produk perundang-undangan	0		0	0	0	14 Peraturan	14 Peraturan	

4.01.2.07.01.20.08	Sosialisasi produk hukum	Terlaksananya sosialisasi produk hukum			0	0	0	75 nagari	75 nagari	
2.08.2.07.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Kelompok PIK KRR yangf didirikan								
2.08.2.07.01.20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KKR	Terbentuknya PIK-KRR di SLTA,PT, Kareng Taruna dan Remaja Masjid			0	0	0	1 klp	1 klp	
1.05 . 2.07.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik								
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan Wasli Nagari	75 Nag	0	54 nagari	54 nagari	100	4 Nagari	4 Nagari	
4.03 . 2.07.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik								
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya Monev		100	100	100	100	100	100	
2.08 . 2.07.01 . 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase Kelompok BKB Holistik Integratif								
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendamping BKB di Kecamatan	300 org	60 org	30 org	30 org	100	60 org	150 org	



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**  
**TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

SKPD : Dinas PMDPPKB KAB. TANAH DATAR

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.07.1.02.07.01.01	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase unit kerja yang terlayani adm perkantoran			<b>361.166.000</b>	
2.07.1.02.07.01.01.01	<b>Kegiatan : 1</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp.3000,- dan Materai Rp.6000,-	Dinas PMDPPKB	600 dan 300	2.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.02	<b>2</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kwh listrik, Jumlah Volume air yang digunakan dan jumlah tagihan telepon	Dinas PMDPPKB	21,98 Kwh, 11,55 M3 dan 1 Thn	45.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.06	<b>3</b> Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 ( 7 unit)dan roda 2 ( 60 unit ) yang dibayar pajaknya	Dinas PMDPPKB	7 unit dan 60 unit	17.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.08	<b>4</b> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	24 jenis	4.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.10	<b>5</b> Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Dinas PMDPPKB	40 jenis	35.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.11	<b>6</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak, jumlah barang yang difoto copy dan jumlah barang yang dijilid	Dinas PMDPPKB	16 jenis,	20.642.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.12	<b>7</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik	Dinas PMDPPKB	14 jenis	5.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.15	<b>8</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan ( surat kabar)	Dinas PMDPPKB	8 bh surat kabar	4.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.17	<b>9</b> Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang disediakan	Dinas PMDPPKB	2.171 bks	20.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.18	<b>10</b> Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat dalam daerah dan luar daerah	Dinas PMDPPKB	100%	95.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.01.19	<b>11</b> Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga kerja dengan penghasilan kerja	Dinas PMDPPKB	7 orang	113.524.000	DAU
2.07.1.02.07.01.02	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan</b>	Dinas PMDPPKB		<b>130.000.000</b>	
2.07.1.02.07.01.02.22	<b>12</b> Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan Gedung Kantor yang diperbaiki	Dinas PMDPPKB	3 unit%	15.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.02.24	<b>13</b> Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diperbaiki	Dinas PMDPPKB	22 unit%	95.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.02.28	<b>14</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	84 unit%	10.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.02.26	<b>15</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	65 unit	10.000.000	DAU

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.07.1.02.07.01.05	<b>Program</b> : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat	Dinas PMDPPKB		10.000.000	
2.07.1.02.07.01.05.01	<b>Kegiatan</b> : 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Dinas PMDPPKB	4 orang	10.000.000	
2.07.1.02.07.01.06	<b>Program</b> : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	Dinas PMDPPKB		17.500.000	
2.07.1.02.07.01.06.01	<b>Kegiatan</b> : 17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	3 dok	5.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.06.04	18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	2 dok	5.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.06.06	19 Penyusunan Perencanaan Tahunan	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	5 dok	7.500.000	DAU
2.07.1.02.07.01.15	<b>Program</b> : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	Persentase kontribusi masyarakat dalam pembangunan			2.970.000.000	
2.07.1.02.07.01.15.06	<b>Kegiatan</b> : 20 Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	Terfasilitasi dan terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK dan Pelaksana Jambore PKK Tk.Provinsi	Kab. Tanah Datar	14 Kec	2.260.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.15.08	<b>Kegiatan</b> : 21 Fasilitasi Pembangunan Perbasis Pemberdayaan Masyarakat	1. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar nagari dalam pengelolaan pembangunan 2. Terlaksananya keterlibatan kelompok masyarakat miskin perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari. 3. tersedianya sarana dan prasarana sosial dasara dan ekonomi masyarakat. 4. terlaksananya bimbingan teknis workshop, sosialisasi rakor, rakornis, dan movev pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. 5. terlaksananya fasilitasi penyedia sarana prasarana dan pelayanan dasar serta pengelolaan pelaksanaan pembangunan nagari.	Kab. Tanah Datar	75 Nagari	350.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.15.04	<b>Kegiatan</b> : 22 Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu	Terfasilitasinya transportasi kader posyandu, penilaian dan peningkatan SDM kader dan pengelola Posyandu Kab.Tanah Datar.	Kab. Tanah Datar	14 Kec	190.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.15.05	<b>Kegiatan</b> 23 Sosialisasi Pembinaan dan Orientasi PMT-AS	Pemberian Makanan Tambahan bagi anak sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	600 siswa	170.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17	<b>Program</b> : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa / Nagari	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari			286.000.000	
2.07.1.02.07.01.17.16	<b>Kegiatan</b> : 24 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Proses Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM)	Terlaksananya kegiatan KKN-PPM di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar	6 PT	15.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.09	<b>Kegiatan</b> : 25 Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan BP-SPAMS Luhak Nan Tuo dalam pengelolaan sarana dan prasarana air minum	Kab.Tanah Datar	105 BP-SPAMS	25.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.10	26 Pembinaan LPM	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pembentukan pengurus DPD dan DPC LPM di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar	15 DPD dan DPC LPM di kabupaten Tanah Datar	45.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.03	<b>Kegiatan</b> : 27 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya rekrutmen, pembekalan dan pembinaan terhadap SPMN	Kab. Tanah Datar	2 org SPMN	24.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.07	<b>Kegiatan</b> : 28 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya BBGRM di Kabupaten Tanah Datar	75 Nagari	75 Nagari	60.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.06	<b>Kegiatan</b> : 29 Pembinaan Nagari Berprestasi	Terlaksananya penilaian Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	14 Nagari	14 Nagari	60.000.000	DAU

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.07.1.02.07.01.17.11	<b>Kegiatan</b> : 30 Peningkatan dan Fasilitasi operasional Profil dan Data Nagari	1. Tersedianya data inventarisasi jenis kegiatan pembangunan yang masuk nagari. 2. terlaksananya pemberdayagunaan data profil nagari. 3. terlaksananya bimtek, rakornis dan workshop profil nagari.	75 Nagari	75 nagari	25.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17.02	<b>Kegiatan</b> : 31 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Nagari	1.Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang terintegrasi,	75 Nagari	75 Nagari	32.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.16	<b>Program</b> : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<b>Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan</b>			<b>150.000.000</b>	
2.07.1.02.07.01.16.09	<b>Kegiatan</b> : 32 Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya peningkatan program TTG yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat	Kab. Tanah Datar	14 posyantek	100.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.16.13	33 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi masyarakat Pedesaan	1. Terlaksananya pembinaan, Sosialisasi, pelatihan, bagi lembaga ekonomi masyarakat 2. terlaksananya fasilitasi pembentukan kepengurusan pasar nagari, cadangan pangan pemerintahan nagari, pembentukan bumrag.		14 Kec	50.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18	<b>Program</b> : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari</b>			<b>367.000.000</b>	
2.07.1.02.07.01.18.01	<b>Kegiatan</b> 34 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kawasan pedesaan	Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan nagari ttg kawasan pedesaan		75 nagari	75.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18.03	<b>Kegiatan</b> 35 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	1.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari , 2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan nagari dalam Mengelola Tata Pemerintahan yang baik dan bersih		25 org	90.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18.22	36 Penilaian Kompetensi Wali Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi wali nagari tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		56 Wali Nagari	65.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18.23	37 Penilaian KAN terbaik tingkat kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya penilaian KAN tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat provinsi Sumbar		75 KAN	65.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18.24	38 Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi sekretaris nagari tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		75 sekretaris Nagari	32.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.18.25	39 Penilaian BPRN	Terlaksananya penilaian kompetensi BPRN tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		75 BPRN	40.000.000	DAU
2.07.1.02.07.01.17	<b>Program</b> : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	<b>Pengelolaan aset nagari</b>			<b>100.000.000</b>	
2.07.1.02.07.01.17.01	40 Pengelolaan Aset Nagari	Terlaksananya Pengelolaan aset Nagari sesuai Aturan yang berlaku		75 Nagari	100.000.000	DAU
2.08	<b>Urusan</b> : KELUARGA BERENCANA					
2.08.1.02.07.01.15	<b>Program</b> : Keluarga Berencana	<b>Rata-rata jumlah anak dalam keluarga</b>			<b>170.000.000</b>	
2.08.1.02.07.01.15.05	<b>Kegiatan</b> : 41 Pembinaan Keluarga Berencana	1. Terlaksananya Rapat Progran KKBPK Tingkat Nagari Kecamatan dan Kabupaten, 2. terfasilitasinya pembentukan Kampung KB.	Kab. Tanah Datar	3 kegiatan, 61 Nagari Kampung KB	130.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.15.07	<b>Kegiatan</b> : 42 Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB ( BOKB )	-Terpenuhinya kebutuhan operaional balai penyuluh KB	Kab. Tanah Datar	14 Balai Penyuluhan KB (kecamatan)	-	DAK

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.08.1.02.07.01.15.06	Kegiatan : 43 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Meningkatnya Sarana dan Prasana Kerja Kader PPKBJ dan Sub PPKBJ	Kab. Tanah Datar	225 Kader	-	DAK
2.08.1.02.07.01.15.08	44 Diseminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk	Kab. Tanah Datar	14 kec	40.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.17	Program : Pelayanan Kontrasepsi	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi			90.000.000	
2.08.1.02.07.01.17.02	Kegiatan : 45 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1. Terlayannya peserta KB baru dan terbinaanya peserta KB aktif. Terfasilitasinya kegiatan TNI KB Kes. Terfasilitasinya kegiatan HKG PKK KB Kes, 2. Pencanangan TNI KB Kes Tingkat Provinsi	Kab. Tanah Datar	790 akseptor	90.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.16	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase perkawinan dibawah umur ideal			70.000.000	
2.08.1.02.07.01.16.01	Kegiatan : 46 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Tersosialisasinya Program kesehatan reproduksi dan generasi berencana kepada remaja	Kab. Tanah Datar	40 org	70.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.18	Program : Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peningkatan PPKBJ/Sub PPKBJ, BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri			550.000.000	
2.08.1.02.07.01.18.01	Kegiatan : 47 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terlaksananya pembayaran transportasi PPKBJ dan Sub-PPKBJ, ikut sertanya kontingen Kab.pada Jambore tk Propinsi, serta Tersfasilitasinya kegiatan HARGANAS serta terfasilitasinya kegiatan kelompok ketahanan keluarga	Kab. Tanah Datar	1000 org	550.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.20	Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK KRR yang didirikan			35.000.000	
2.08.1.02.07.01.20.01	48 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Terlaksananya pemilihan Duta Gendre Tk.Kabupaten	Kab. Tanah Datar	14 Klp	35.000.000	DAU
2.08.1.02.07.01.23	Program : Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Balita	persentase kelompok BKB holistik Integratif			30.000.000	
2.08.1.02.07.01.23.01	Kegiatan : 49 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terfasilitasinya model kegiatan BKB, posyandu dan PAUD terintegrasi	Kab. Tanah Datar	60 org	30.000.000	DAU
2.03	Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
2.03.1.02.07.01.21	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik			15.000.000	
2.03.1.02.07.01.21.13	Kegiatan : 50 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	14 Kecamatan	14 Kec	15.000.000	DAU
2.03.1.02.07.01.16	Program : Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama nagari dengan dunia usaha/lembaga			108.000.000	
2.03.1.02.07.01.16.03	Kegiatan : 51 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama Antar Nagari dan Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga, 2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Desa 3. Terlaksananya kerjasama dengan perantau/pihak III	Kab. Tanah Datar	1 organisasi	68.000.000	
2.03.1.02.07.01.16.05	Kegiatan : 52 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	14 Kecamatan	75 Nagari	40.000.000	DAU
2.01.1.02.07.01.20	Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum Peraturan Perundang-undangan			210.000.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.01.1.02.07.01.20.06	<b>Kegiatan</b> : 53 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih tinggi dan Keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Kab. Tanah Datar	3 Peraturan	150.000.000	DAU
2.01.1.02.07.01.20.08	<b>Kegiatan</b> : 54 Sosialisai Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Terlaksananya Sosialisai Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Kab. Tanah Datar	75 Nagari	60.000.000	DAU
2.03.1.02.07.01.15	<b>Program</b> : Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik			15.000.000	
2.03.1.02.07.01.15.02	<b>Kegiatan</b> : 55 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Program dan kegiatan SKPD serta terlaksananya Forum Internal SKPD	Dinas PMDPPKB	1 Dokumen perencanaan, evaluasi program dan 1 kgt forum SKPD	15.000.000	DAU
<b>20 Program, 59 Kegiatan Total .....</b>					<b>5.684.666.000</b>	

Batusangkar, 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



**ADRION NURDAL, SE**  
NIP. 19620214 199003 1 003



---

---

946.000.000

#REF!



#REF!























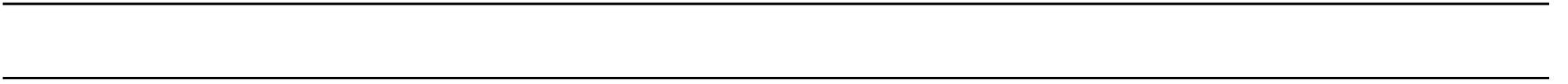










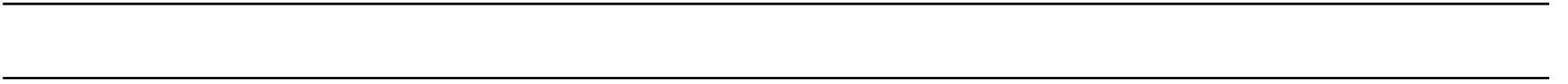








































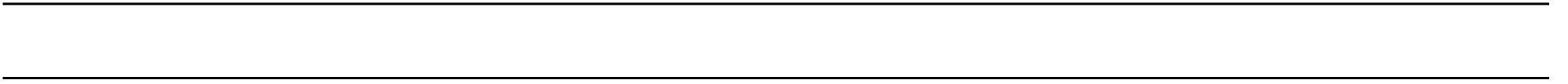










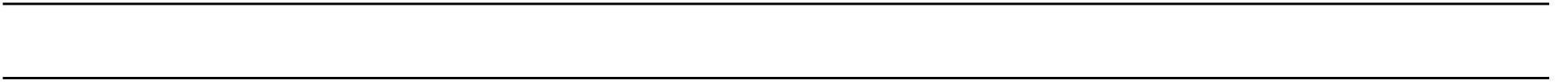






































**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**  
**TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**  
**(SIMREDA)**

SKPD : Dinas PMDPPKB KAB. TANAH DATAR

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.1.02.07.01.01	<b>Program</b> : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang terlayani adm perkantoran			604.885.440				656.885.440
2.07.1.02.07.01.01.01	<b>Kegiatan</b> : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp.3000,- dan Materai Rp.6000,-	Dinas PMDPPKB	600 dan 300	4.500.000	DAU			4.500.000
2.07.1.02.07.01.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kwh listrik, Jumlah Volume air yang digunakan dan jumlah tagihan telepon	Dinas PMDPPKB	21,98 Kwh, 11,55 M3 dan 1 Thn	45.000.000	DAU			50.000.000
2.07.1.02.07.01.01.06	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 ( 7 unit)dan roda 2 ( 60 unit ) yang dibayar pajaknya	Dinas PMDPPKB	7 unit dan 60 unit	25.000.000	DAU			30.000.000
2.07.1.02.07.01.01.08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	Dinas PMDPPKB	24 jenis	7.000.000	DAU			10.000.000
2.07.1.02.07.01.01.10	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Dinas PMDPPKB	40 jenis	75.000.000	DAU			80.000.000
2.07.1.02.07.01.01.11	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak, jumlah barang yang difoto copy dan jumlah barang yang dijilid	Dinas PMDPPKB	16 jenis,	40.000.000	DAU			45.000.000
2.07.1.02.07.01.01.12	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik	Dinas PMDPPKB	14 jenis	10.000.000	DAU			15.000.000
2.07.1.02.07.01.01.15	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan ( surat kabar)	Dinas PMDPPKB	8 bh surat kabar	7.000.000	DAU			9.000.000
2.07.1.02.07.01.01.17	9 Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang disediakan	Dinas PMDPPKB	2.171 bks	43.000.000	DAU			45.000.000
2.07.1.02.07.01.01.18	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat dalam daerah dan luar daerah	Dinas PMDPPKB	100%	165.000.000	DAU			185.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.07.1.02.07.01.01.19	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga kerja dengan penghasilan kerja	Dinas PMDPPKB	7 orang	183.385.440	DAU		7orang	183.385.440
2.07.1.02.07.01.02	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan</b>	Dinas PMDPPKB		<b>644.000.000</b>				<b>710.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.02.09	<b>Kegiatan</b> 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Dinas PMDPPKB Laptop, Printer, Komputer PC dan GPS	Dinas PMDPPKB	5 unit	90.000.000	DAU			100.000.000
2.07.1.02.07.01.02.22	13 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan Gedung Kantor yang diperbaiki	Dinas PMDPPKB	100%	60.000.000	DAU			75.000.000
2.07.1.02.07.01.02.24	14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang diperbaiki	Dinas PMDPPKB	22 unit%	229.000.000	DAU			250.000.000
2.07.1.02.07.01.02.28	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	84 unit%	25.000.000	DAU			35.000.000
2.07.1.02.07.01.02.26	16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas PMDPPKB	65 unit	40.000.000	DAU			50.000.000
2.07.1.02.07.01.02.42	17 Rehab Sedang/ berat Gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhab	Dinas PMDPPKB	1 unit%	200.000.000	DAU			200.000.000
2.07.1.02.07.01.05	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang mengikuti diklat</b>	Dinas PMDPPKB		<b>25.000.000</b>				<b>26.620.000</b>
2.07.1.02.07.01.05.01	<b>Kegiatan</b> : 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Dinas PMDPPKB	10 org	25.000.000			10 org	26.620.000
2.07.1.02.07.01.06	<b>Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan yang disusun tepat waktu</b>	Dinas PMDPPKB		<b>30.500.000</b>				<b>35.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.06.01	<b>Kegiatan</b> : 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	3 dok	7.500.000	DAU		3 dok	10.000.000
2.07.1.02.07.01.06.04	20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	2 dok	11.500.000	DAU		2 dok	12.500.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.07.1.02.07.01.06.06	21 Penyusunan Perencanaan Tahunan	Jumlah laporan	Dinas PMDPPKB	5 dok	11.500.000	DAU		5 dok	12.500.000
2.07.1.02.07.01.15	<b>Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Persentase kontribusi masyarakat dalam pembangunan</b>			<b>4.000.000.000</b>				<b>4.255.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.15.06	<b>Kegiatan : 22</b> Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	Terfasilitasi dan terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK dan Pelaksana Jambore PKK Tk.Provinsi	Kab. Tanah Datar	14 Kec	1.600.000.000	DAU		14 Kec	1.660.000.000
2.07.1.02.07.01.15.08	<b>Kegiatan : 23</b> Fasilitasi Pembangunan Perbasis Pemberdayaan Masyarakat	1. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar nagari dalam pengelolaan pembangunan 2. Terlaksananya keterlibatan kelompok masyarakat miskin perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari. 3. tersedianya sarana dan prasarana sosial dasara dan ekonomi masyarakat. 4. terlaksananya bimbingan teknis workshop, sosialisasi rakor, rakornis, dan monev pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. 5. terlaksananya fasilitasi penyedia sarana prasarana dan pelayanan dasar serta pengelolaan pelaksanaan pembangunan nagari.	Kab. Tanah Datar	75 Nagari	1.100.000.000	DAU		75 Nagari	1.160.000.000
2.07.1.02.07.01.15.04	<b>Kegiatan : 24</b> Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu	Terfasilitasinya transportasi kader posyandu, penilaian dan peningkatan SDM kader dan pengelola Posyandu Kab.Tanah Datar.	Kab. Tanah Datar	12 bulan	600.000.000	DAU		12 bulan	660.000.000
2.07.1.02.07.01.15.05	<b>Kegiatan 25</b> Sosialisasi Pembinaan dan Orientasi PMT-AS	Pemberian Makanan Tambahan bagi anak sekolah Dasar	Kab. Tanah Datar	.....	700.000.000	DAU			775.000.000
2.07.1.02.07.01.17	<b>Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa / Nagari</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari</b>			<b>711.000.000</b>				<b>839.000.000</b>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.07.1.02.07.01.17.16	<b>Kegiatan</b> : 26 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Proses Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM)	Terlaksananya kegiatan KKN-PPM di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar	80%	40.000.000	DAU		80%	45.000.000
2.07.1.02.07.01.17.09	<b>Kegiatan</b> : 27 Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan BP-SPAMS Luhak Nan Tuo dalam pengelolaan sarana dan prasarana air minum	Kab.Tanah Datar	Assosiasi BP SPAMS Luhak Nan Tuo	65.000.000	DAU		Assosiasi BP SPAMS Luhak Nan Tuo	75.000.000
2.07.1.02.07.01.17.10	28 Pembinaan LPM	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pembentukan pengurus DPD dan DPC LPM di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar	15 DPD dan DPC LPM di kabupaten Tanah Datar	75.000.000	DAU		15 DPD dan DPC LPM di kabupaten Tanah Datar	117.000.000
2.07.1.02.07.01.17.03	<b>Kegiatan</b> : 29 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya rekrutmen, pembekalan dan pembinaan terhadap SPMN	Kab. Tanah Datar	2 org SPMN	56.000.000	DAU		2 org SPMN	62.000.000
2.07.1.02.07.01.17.07	<b>Kegiatan</b> : 30 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya BBGRM di Kabupaten Tanah Datar	75 Nagari	75 Nagari	150.000.000	DAU		75 Nagari	155.000.000
2.07.1.02.07.01.17.06	<b>Kegiatan</b> : 31 Pembinaan Nagari Berprestasi	Terlaksana penilaian Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	14 Nagari	14 Nagari	100.000.000	DAU		14 Nagari	140.000.000
2.07.1.02.07.01.17.11	<b>Kegiatan</b> : 32 Peningkatan dan Fasilitasi operasional Profil dan Data Nagari	1. Tersedianya data inventarisasi jenis kegiatan pembangunan yang masuk nagari. 2. terlaksananya pemberdayaan data profil nagari. 3. terlaksananya bimtek, rakornis dan workshop profil nagari.	75 Nagari	75 nagari	75.000.000	DAU		75 nagari	85.000.000
2.07.1.02.07.01.17.02	<b>Kegiatan</b> : 33 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Nagari	1.Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang terintegrasi,	75 Nagari	75 Nagari	150.000.000	DAU		75 Nagari	160.000.000
2.07.1.02.07.01.16	<b>Program</b> : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	<b>Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan</b>			<b>760.000.000</b>				<b>890.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.16.10	<b>Kegiatan</b> 34 Pembinaan Usaha Mikro kecil dan menengah ( UED, UEMSP, SPP)	1.Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro kecil dan menengah ( UED, UEMSP, SPP),	Kab. Tanah Datar	75 Nagari	170.000.000	DAU		75 Nagari	180.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.07.1.02.07.01.16.09	<b>Kegiatan</b> : 35 Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya peningkatan program TTG yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat	Kab. Tanah Datar	14 posyantek	240.000.000	DAU		14 posyantek	310.000.000
2.07.1.02.07.01.16.13	36 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi masyarakat Pedesaan	1. Terlaksananya pembinaan, Sosialisasi, pelatihan, bagi lembaga ekonomi masyarakat 2. terlaksananya fasilitasi pembentukan kepengurusan pasar nagari, cadangan pangan pemerintahan nagari, pembentukan bumrag.		75 nagari	350.000.000	DAU		14 kec	400.000.000
2.07.1.02.07.01.18	<b>Program</b> : <b>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari</b>			<b>1.300.000.000</b>				<b>1.480.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.18.01	<b>Kegiatan</b> 37 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kawasan pedesaan	Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan nagari ttg kawasan pedesaan		75 nagari	150.000.000	DAU		75 nagari	200.000.000
2.07.1.02.07.01.18.03	<b>Kegiatan</b> 38 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	1.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari , 2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari dalam Mengelola Tata Pemerintahan yang baik dan bersih		267 orang	600.000.000	DAU		75 orang	650.000.000
2.07.1.02.07.01.18.22	39 Penilaian Kompetensi Wali Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi wali nagari tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		56 Wali Nagari	100.000.000	DAU		75 Wali Nagari	180.000.000
2.07.1.02.07.01.18.23	40 Penilaian KAN terbaik tingkat kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya penilaian KAN tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat provinsi Sumbar		75 KAN	150.000.000	DAU		75 KAN	150.000.000
2.07.1.02.07.01.18.24	41 Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi sekretaris nagari tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		75 sekretaris Nagari	150.000.000	DAU		75 sekretaris Nagari	150.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.07.1.02.07.01.18.25	42 Penilaian BPRN	Terlaksananya penilaian kompetensi BPRN tingkat kabupaten Tanah Datar dan tingkat Provinsi		75 BPRN	150.000.000	DAU		75 BPRN	150.000.000
2.07.1.02.07.01.17	<b>Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari</b>	<b>Pengelolaan aset nagari</b>			<b>250.000.000</b>				<b>300.000.000</b>
2.07.1.02.07.01.17.01	43 Pengelolaan Aset Nagari	Terlaksananya Pengelolaan aset Nagari sesuai Aturan yang berlaku		75 Nagari	250.000.000	DAU		75 Nagari	300.000.000
2.05.1.02.07.01.21	<b>Program : Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik</b>			<b>1.500.000.000</b>				<b>200.000.000</b>
2.05.1.02.07.01.21.11	<b>Kegiatan 44</b> Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan wali nagari		15 nagari	1.500.000.000	DAU		2 Nagari	200.000.000
2.08	<b>Urusan : KELUARGA BERENCANA</b>								
2.08.1.02.07.01.15	<b>Program : Keluarga Berencana</b>	<b>Rata-rata jumlah anak dalam keluarga</b>			<b>4.612.390.000</b>				<b>4.722.390.000</b>
2.08.1.02.07.01.15.05	<b>Kegiatan : 45</b> Pembinaan Keluarga Berencana	1. Terlaksananya Rapat Program KKBPK Tingkat Nagari Kecamatan dan Kabupaten, 2. terfasilitasinya pembentukan Kampung KB.	Kab. Tanah Datar	3 kegiatan, 61 Nagari Kampung KB	350.000.000	DAU		75 nagari	410.000.000
2.08.1.02.07.01.15.07	<b>Kegiatan : 46</b> Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB ( BOKB )	-Terpenuhinya kebutuhan operasional balai penyuluh KB	Kab. Tanah Datar	14 Balai Penyuluhan KB (kecamatan)	3.207.140.000	DAK		14 Balai Penyuluhan KB (kecamatan)	3.207.140.000
2.08.1.02.07.01.15.06	<b>Kegiatan : 47</b> Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Kader PPKBJ dan Sub PPKBJ	Kab. Tanah Datar	225 Kader	805.250.000	DAK		900 akseptor	805.250.000
2.08.1.02.07.01.15.08	48 Diseminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk	Kab. Tanah Datar	14 kec	250.000.000	DAU		14 kec	300.000.000
2.08.1.02.07.01.17	<b>Program : Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi</b>			<b>500.000.000</b>				<b>540.000.000</b>
2.08.1.02.07.01.17.02	<b>Kegiatan : 49</b> Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1. Terlayannya peserta KB baru dan terbinaanya peserta KB aktif. Terfasilitasinya kegiatan TNI KB Kes. Terfasilitasinya kegiatan HKG PKK KB Kes, 2. Pencanangan TNI KB Kes Tingkat Provinsi	Kab. Tanah Datar	46.350 akseptor	500.000.000	DAU		41.140 akseptor	540.000.000
2.08.1.02.07.01.16	<b>Program : Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b>	<b>Persentase perkawinan dibawah umur ideal</b>			<b>150.000.000</b>				<b>160.000.000</b>

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.08.1.02.07.01.16.01	<b>Kegiatan</b> : 50 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Tersosialisasinya Program kesehatan reproduksi dan generasi berencana kepada remaja	Kab. Tanah Datar	2800 orang	150.000.000	DAU		32 klp PIK Remaja	175.000.000
2.08.1.02.07.01.18	<b>Program</b> : Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peningkatan PPKBJ/Sub PPKBJ, BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri			700.000.000				750.000.000
2.08.1.02.07.01.18.01	<b>Kegiatan</b> : 51 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terlaksananya pembayaran transportasi PPKBJ dan Sub-PPKBJ, ikut sertanya kontingen Kab.pada Jambore tk Propinsi, serta Tersfasilitasinya kegiatan HARGANAS serta terfasilitasinya kegiatan kelompok ketahanan keluarga	Kab. Tanah Datar	1000 org	700.000.000	DAU		1000 org	750.000.000
2.08.1.02.07.01.20	<b>Program</b> : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK KRR yang didirikan			150.000.000				200.000.000
2.08.1.02.07.01.20.01	52 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Terlaksananya pemilihan Duta Gendre Tk.Kabupaten	Kab. Tanah Datar	14 Klp	150.000.000	DAU		14 klp	200.000.000
2.08.1.02.07.01.23	<b>Program</b> : Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Balita	persentase kelompok BKB holistik Integratif			80.000.000				100.000.000
2.08.1.02.07.01.23.01	<b>Kegiatan</b> : 53 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terfasilitasinya model kegiatan BKB, posyandu dan PAUD terintegrasi	Kab. Tanah Datar	65 org	80.000.000	DAU		30 klp	100.000.000
2.03	<b>Urusan</b> : PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
2.03.1.02.07.01.21	<b>Program</b> : Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik			35.000.000				40.000.000
2.03.1.02.07.01.21.13	<b>Kegiatan</b> : 54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	14 Kecamatan	14 Kec	35.000.000	DAU		14 Kec	40.000.000
2.03.1.02.07.01.16	<b>Program</b> : Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama nagari dengan dunia usaha/lembaga			450.000.000				500.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA 2019 ( TAHUN RENCANA )				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2.03.1.02.07.01.16.03	<b>Kegiatan</b> : 55 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama Antar Nagari dan Kerjasama Nagari dengan Pihak Ketiga, 2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Desa 3. Terlaksananya kerjasama dengan perantau/pihak III	Kab. Tanah Datar	10 Nagari	300.000.000				350.000.000
2.03.1.02.07.01.16.05	<b>Kegiatan</b> : 56 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	14 Kecamatan	75 Nagari	150.000.000	DAU		75 Nagari	150.000.000
2.01.1.02.07.01.20	<b>Program</b> : <b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Produk hukum Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>450.000.000</b>				<b>800.000.000</b>
2.01.1.02.07.01.20.06	<b>Kegiatan</b> : 57 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undanga yang Baru Lebih tinggi dan Keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Kab. Tanah Datar	3 Peraturan	300.000.000	DAU			500.000.000
2.01.1.02.07.01.20.08	<b>Kegiatan</b> : 58 Sosialisai Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Terlaksananya Sosialisai Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan tentang Nagari	Kab. Tanah Datar	75 Nagari	150.000.000	DAU			300.000.000
2.03.1.02.07.01.15	<b>Program</b> : <b>Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik</b>			<b>30.000.000</b>				<b>40.000.000</b>
2.03.1.02.07.01.15.02	<b>Kegiatan</b> : 59 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Program dan kegiatan SKPD serta terlaksannya Forum Internal SKPD	Dinas PMDPPKB	1 Dokumen perencanaan, evaluasi program dan 1 kgt forum SKPD	30.000.000	DAU		1 Dokumen perencanaan, evaluasi program dan 1 kgt forum SKPD	40.000.000
<b>20 Program, 59 Kegiatan Total .....</b>					<b>16.982.775.440</b>	-	-	-	<b>17.244.895.440</b>

Batusangkar, 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

  
**ADRION NURDAL, SE**

NIP. 19620214 199003 1 003



---

---

946.000.000





#REF!



262.120.000